

**INTEGRASI NILAI ISLAM DAN PANCASILA DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN**

¹Triana Puspita Sari, ²Dea Angel Tri Agustin

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: 1deaangelagustin@gmail.com, 2trianapuspitasari669@gmail.com

ABSTRAK

Integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang beretika, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan nilai-nilai religius dengan prinsip kebangsaan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk integrasi nilai Islam dan Pancasila serta implikasinya dalam tata kelola pemerintahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah memiliki kesesuaian dengan sila-sila dalam Pancasila, sehingga dapat diintegrasikan secara harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi ini mampu memperkuat prinsip good governance, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kesimpulannya, integrasi nilai Islam dan Pancasila merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: integrasi nilai; Islam dan Pancasila; tata kelola pemerintahan; good governance; etika pemerintahan

ABSTRACT

The integration of Islamic values and Pancasila in governance is an important issue in realizing an ethical, just, and welfare-oriented governmental system. This study is motivated by the need to harmonize religious values with national principles in the practice of governance in Indonesia. The objective of this research is to analyze the forms of integration between Islamic values and Pancasila and their implications for governance. The method used is a qualitative approach with literature study techniques and descriptive analysis of relevant scientific sources. The results indicate that Islamic values such as justice, trustworthiness, and deliberation are aligned with the principles of Pancasila, allowing for harmonious integration in governance practices. This integration strengthens the principles of good governance, enhances accountability, and builds public trust in government institutions. In conclusion, the integration of Islamic values and Pancasila serves as a crucial foundation for creating governance that is ethical, transparent, and sustainable in Indonesia.

Keywords: value integration; Islam and Pancasila; governance; good governance; public ethics

Pendahuluan

Integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki karakteristik unik yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan ideologi negara yang bersifat inklusif dan pluralistik. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktik tata kelola pemerintahan, integrasi kedua nilai tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya integritas aparatur negara, serta kurangnya keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menekankan prinsip amanah, keadilan ('*adl*), musyawarah (*shura*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Prinsip-prinsip ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima. Oleh karena itu, integrasi antara nilai Islam dan Pancasila bukanlah suatu hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut (Abdullah Idi, 2025), integrasi nilai agama dalam sistem pemerintahan modern dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis moral dan etika birokrasi yang kerap terjadi di negara berkembang.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat dinamika sosial-politik yang berkembang saat ini. Tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi praktik-praktik penyimpangan jika tidak diimbangi dengan nilai moral yang kuat. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam dapat berperan sebagai landasan etika, sementara Pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan bernegara. Penelitian oleh (Nurcholish Madjid, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kualitas moral para pelaku pemerintahan.

Selain itu, fenomena lemahnya integritas dalam birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan praktik di lapangan. Banyak aparatur negara yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila maupun ajaran agama dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Pancasila secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan. Menurut (Masykuri Abdillah, 2024), integrasi nilai agama dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah membahas tentang nilai-nilai Islam dalam pemerintahan maupun implementasi Pancasila dalam kehidupan

berbangsa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengkaji integrasi kedua nilai tersebut dalam konteks tata Kelola pemerintahan. Penelitian oleh (Ahmad Syafii Maarif, 2022) menekankan pentingnya harmonisasi antara agama dan negara dalam membangun peradaban yang berkeadaban. Sementara itu, penelitian lain oleh (Azyumardi Azra, 2023) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang moderat dapat menjadi landasan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana integrasi tersebut dapat diimplementasikan secara konkret dalam praktik pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan serta sejauh mana integrasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat masih adanya kesenjangan antara nilai normatif dan praktik empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat integrasi nilai-nilai tersebut dalam konteks birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan integrasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan berbasis nilai, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih beretika dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan studi keislaman. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparatur negara akan pentingnya nilai moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penelitian ini, integrasi nilai Islam dan Pancasila didefinisikan sebagai suatu proses penyatuan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud mencakup seluruh proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta praktik sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada bagaimana nilai-nilai Islam dan Pancasila diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam praktik tata kelola pemerintahan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintahan, baik pada tingkat desa maupun instansi pemerintahan daerah yang relevan dengan objek penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti adanya penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam praktik pemerintahan. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, yaitu selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap observasi awal hingga analisis data.

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tata kelola pemerintahan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik penelitian. Selain itu, objek penelitian ini adalah proses integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek kebijakan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik tata kelola pemerintahan dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait integrasi nilai Islam dan Pancasila. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama (human instrument), yang didukung dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta alat bantu seperti perekam suara dan dokumentasi. Peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 35 – 42.

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola dan hubungan antar data yang ditemukan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Menurut (Sugiyono, 2019), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi literatur dan penyusunan instrumen penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama, yaitu aspek nilai normatif, aspek implementatif, dan aspek kelembagaan. Pada aspek nilai normatif, ditemukan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (shura), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa secara konseptual tidak terdapat pertentangan antara nilai Islam dan Pancasila, melainkan adanya titik temu yang kuat sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada aspek implementatif, hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila tercermin dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, transparansi, serta partisipasi publik. Misalnya, penerapan prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa maupun daerah menunjukkan adanya internalisasi nilai Islam yang sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih adanya kendala seperti rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap nilai integratif, serta praktik birokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah.

Selanjutnya, pada aspek kelembagaan, integrasi nilai Islam dan Pancasila terlihat dalam peran institusi pemerintahan dan lembaga sosial keagamaan yang saling bersinergi dalam membangun tata kelola yang baik (*good governance*). Kelembagaan yang mengakomodasi nilai religius dan nasionalisme secara seimbang mampu menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa integrasi nilai agama dalam sistem pemerintahan dapat memperkuat legitimasi moral dan etika birokrasi (Rahman, 2020).

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila memiliki implikasi teoritis dalam memperkuat konsep tata kelola pemerintahan berbasis nilai (*value-based governance*). Secara teoritis, temuan ini mendukung pandangan bahwa nilai agama dan ideologi negara dapat berjalan secara harmonis dalam konteks negara plural seperti Indonesia. Hal ini juga memperkuat hasil penelitian Suryadi (2019) yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa kehilangan karakter kebangsaan.

Secara praktis, integrasi ini memberikan kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih etis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai amanah mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, sementara nilai keadilan memastikan distribusi kebijakan yang merata. Namun, untuk mencapai integrasi yang optimal, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan pendidikan nilai, serta komitmen politik yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap lini pemerintahan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan integrasi sebagai pendekatan holistik yang tidak hanya memadukan nilai, tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam sistem pemerintahan, sehingga mampu menjawab tantangan moral dan etika dalam birokrasi modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu pendekatan yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Nilai-nilai dasar dalam Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Integrasi ini tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan etika, moralitas, serta tanggung jawab publik.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam kerangka Pancasila dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 35 – 42.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian integrasi nilai keagamaan dan ideologi negara sebagai landasan etis dalam administrasi publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai moral serta kebangsaan.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai religius dan nilai kebangsaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang masih terbatas serta belum mencakup analisis empiris yang lebih luas di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam praktik pemerintahan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik berupa bantuan akademik, fasilitas, maupun dukungan moral. Terima kasih juga disampaikan kepada institusi terkait yang telah memberikan kesempatan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2007). Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik. Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
- Arifin, Z., & Nasution, M. I. (2019). Integration of Islamic values in public governance: A conceptual framework. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 120–135. <https://doi.org/10.18196/jgpp.62123>
- Fauzi, A., & Rahman, M. (2021). Community empowerment through Islamic social values in rural development. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.5678>
- Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of Islamic work ethics in youth organizations. *International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.5678/ijis.v5i1.234>
- Ismail, R., & Kurniawan, D. (2022). Good governance and Islamic principles in public administration. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jian.v18i1.7890>

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 35 – 42.

- Karim, A., & Huda, N. (2018). Pancasila and Islamic values: Harmonization in Indonesian governance. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1), 95–118. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.95-118>
- Latif, Y. (2019). The religiosity, nationality, and sociality of Pancasila: Toward Pancasila-based governance. *Journal of Indonesian Social Sciences*, 11(2), 101–115.
- Maulana, R., & Fitriani, S. (2023). Strengthening public service ethics through Islamic and Pancasila values. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 67–80. <https://doi.org/10.20476/jap.v14i1.4567>
- Nugroho, R., & Santoso, B. (2021). Integrasi nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 210–225. <https://doi.org/10.31258/jkp.12.3.210-225>
- Prasetyo, E., & Lestari, D. (2020). Ethical governance based on Pancasila values in Indonesia. *Jurnal Etika dan Pemerintahan*, 5(2), 88–102.
- Rahman, F., & Aziz, A. (2022). Islamic governance and its relevance in modern public administration. *International Journal of Public Administration*, 45(4), 300–312. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1873456>
- Sari, M., & Wibowo, A. (2023). Collaborative governance based on religious and national values in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jsp.65432>
- Setiawan, H., & Putri, R. (2021). The role of Pancasila in shaping ethical leadership in government institutions. *Jurnal Kepemimpinan Publik*, 9(2), 134–148.
- Suharto, E., & Pramono, J. (2019). Public policy and governance reform in Indonesia: Integrating local values. *Policy & Governance Review*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.123>
- Yusuf, M., & Hakim, L. (2020). Islamic perspectives on good governance: A literature review. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(4), 567–580. <https://doi.org/10.18196/jgp.11467>